

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

A. Gunawan Sutiardja, 1990, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius.

Abu Daud Busroh, 2011, *Ilmu Negara Cetakan Kedelapan*, Jakarta: Bumi Aksara.

Bagir Manan, 2002, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII.

Dasril Radjab, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Edie Toet Hendratno, 2009, *Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federalisme*, Jakarta: Graha Ilmu dan Universitas Pancasila Press.

Hari Sabarno, 2008, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Jakarta: Sinar Grafika.

I Gede Pantja Astawa, 2009, *Problematika Hukum Otonomi Daerah Di Indonesia*, Bandung: Alumni.

Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Kelompok Gramedia.

_____, 2009, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia.

Maswardi Rauf, 2007, *Pemerintah Daerah Dan Konflik* dalam buku *Desentralisasi & Otonomi Daerah*, Jakarta: LIPI Press.

Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saragih, 2007, *Ilmu Negara*, Jakarta: Gaya Media Pratama.

MPR RI, 2009, *Paduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sesuai Dengan Bab, Pasal, dan Ayat*, Jakarta: Sekjen MPR RI.

Muhammad Ibrahim, 1991, *Sejarah Daerah Istimewa Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, Jakarta, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional.

Ni'matul Huda, 2010, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

_____, 2010, *Ilmu Negara Cetakan Kedua*, Jakarta: RajaGrafindo.

_____, 2013, *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perdebatan Konstitusi dan Perundang-undangan di Indonesia*, Bandung: Nusa Media.

Philipus M. Hadjon, 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Rozali Abdullah, 2011, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Jakarta: Rajawali Pers.

Rusadi Kantaprawira, 1998, *Hukum dan Kekuasaan*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

S. H. Sarundajang, 1997, *Pemerintahan Daerah Di Berbagai Daerah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

_____, 2002, *Arus Balik kekuasaan Pusat ke Daerah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Siswanto Sunarno, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Soehino, 2008, *Ilmu Negara Cetakan Kedelapan*, Yogyakarta: Liberty.

Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Suharizal, 2011, *Pemilukada Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Perkasa.

Sujanto, 1988, *Daerah Istimewa Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara.

The Liang Gie, 1993, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*, Yogyakarta: Libety.

II. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan dan Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

III. Makalah

Philipus M. Hadjon, *Makalah Tentang Wewenang*, Surabaya: Universitas Airlangga.

IV. Website

<http://swillsond.typepad.com>, *Landasan Pemerintahan Daerah*, diakses pada tanggal 18 November 2014.



<http://id.wikipedia.org>, *Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta*, Diakses pada 10 Desember 2015.

<http://moch-ariief-awaludin-fisip12.web.unair.ac.id>, Pemberian Nama Daerah Istimewa Di Indonesia, diakses pada tanggal 10 Desember 2015.

<http://id.wikipedia.org>, *Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta*, Diakses pada 10 Desember 2015.

<http://www.pemda-diy.go.id>, *Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta*. Diakses pada tanggal 17 Maret 2014.

<http://www.paydjo.net>, *Sejarah Kota Jogja*. Diakses pada tanggal 17 Maret 2015.

